KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ahli Usulkan Kartu Dana Otonomi Khusus Papua
Tanggal : Jumat, 04 Juni 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Ahli Usulkan Kartu Dana Otonomi Khusus Papua

Untuk mengatasi ketertinggalan di Papua, ada usulan agar memberikan kartu dana otsus bagi orang asli Papua. Diharapkan warga asli dapat menerima manfaatnya secara langsung.

JAKARTA, KOMPAS — Terobosan luar biasa harus dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan yang dialami Papua dan Papua Barat terhadap daerah lainnya. Optimalisasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diharapkan dapat dilakukan dengan menjamin dana otsus Papua itu dinikmati langsung oleh orang asli Papua. Ahli pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada antara lain mengusulkan agar ada kartu dana otsus Papua yang diterima oleh masyarakat Papua guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Ahli dari UGM itu merupakan satu dari dua ahli politik dan pemerintahan yang dihadirkan Panitia Khusus Revisi UU Otsus Papua DPR dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), Kamis (3/6/2021), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka adalah Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Bambang Purwoko dan peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mardyanto Wahyu Tryatmoko. RDPU ini digelar untuk mengakomodasi masukan dari publik terkait penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) oleh DPR dalam pembahasan revisi UU Otsus Papua yang diajukan pemerintah.

Dalam rekomendasinya, Bambang mengatakan, selama 20 tahun otsus Papua berjalan, tidak banyak perubahan berarti yang dirasakan oleh masyarakat. Selain problem tata kelola dan manajemen pemerintahan serta implementasi UU Otsus yang tidak konsisten, baik oleh pusat maupun daerah, pengelolaan dana otsus juga menjadi pertanyaan besar. Oleh karena itu, pengelolaan dana otsus harus menjadi salah satu fokus, yakni dengan memastikan ada sebagian dari dana otsus tersebut yang sampai secara langsung ke tangan orang asli Papua (OAP).

"Dana pendidikan digelontorkan triliunan rupiah, begitu juga dana kesehatan dan ekonomi. Namun, kualitas pendidikan rata-rata di Papua tetap masih hancur. Kondisi tahun 2019 dan 2020, anak-anak usia SMA yang belum bisa membaca itu sangat banyak. Untuk apa dana pendidikan itu dan ke mana larinya," katanya.

Jika pemerintah mengusulkan dana otsus dinaikkan di dalam revisi Otsus Papua, Gugus Tugas Papua UGM merekomendasikan adanya satu ayat tertentu di dalam Pasal 34 yang mengatur kartu atau semacam voucer dana otsus Papua. Bambang mengatakan, usulan itu sudah didiskusikan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan telah mendapatkan "lampu hijau".

Pasal 34 yang dimaksud Bambang mengatur tentang dana otsus dan distribusinya. Dengan penambahan ayat di dalam pasal itu, ahli berharap akan ada kartu dana otsus yang bisa digunakan OAP untuk belanja pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan bahan bangunan perumahan. Penyaluran dana langsung ini diharapkan bisa mengungkit kesejahteraan warga secara langsung.

Untuk merealisasikannya, pemerintah pusat dan daerah mesti menyiapkan daya dukungnya, seperti pusat grosir dan pelayanan publik yang bisa dibayar dengan voucer atau kartu tersebut. Lebih jauh, Bambang mengatakan, kartu itu sekaligus mendata OAP karena selama ini jumlah OAP tidak terdokumentasi baik.

Gugus Tugas Papua UGM juga mengusulkan ada lembaga khusus yang mengelola dan mengoordinasi jalannya otsus Papua dan pembangunan Papua. Lembaga ini memiliki fungsi koordinasi, baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah di Papua.

Atasi ketertinggalan

Usulan penggunaan kartu dana otsus ini mendapatkan respons positif dari anggota pansus. Anggota pansus dari Fraksi Nasdem, Rico Sia, mengatakan, usulan kartu dana otsus itu penting untuk direalisasikan. "Kita harus sepakat benar-benar ini akarnya untuk orang Papua. Kita mau atasi ketertinggalan dan ketidakadilan tadi dari berbagai sektor yang ada," katanya.

Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun juga menanggapi positif usulan itu. Menurut dia, pengadaan kartu dana otsus itu akan memastikan warga asli Papua menikmati dana otsus untuk berbagai kebutuhan dasar mereka. Tujuannya agar ada akselerasi kesejahteraan bagi OAP.

Komarudin juga sependapat dengan Bambang soal pembentukan lembaga khusus yang menangani pembangunan Papua. Agar lebih berdaya guna dan jelas rantai koordinasinya, lembaga khusus itu harus berada di bawah presiden langsung. Dengan demikian, perkembangan lembaga langsung dapat dimonitor oleh presiden.

Anggota pansus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jimmy Demianus Okie, mengatakan, revisi Otsus Papua harus pula mengatur definisi yang jelas siapa OAP itu. Dengan demikian, peruntukan dana otsus untuk OAP menjadi tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan karena dinikmati oleh pendatang.

Mardyanto, ahli dari LIPI, mengatakan, untuk menghindari resistensi terhadap revisi UU Otsus Papua, pembahasan revisi harus melalui proses renegosiasi antara pemerintah pusat dan Papua, serta di internal orang Papua. Pelibatan tokoh-tokoh adat dan agama setempat pun menjadi penting, selain untuk memberikan solusi dari gangguan keamanan di Papua.

"Revisi ini mesti dijadikan momentum dialog antara pusat dan daerah (Papua)," kata Mardyanto. (REK)